



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

2026

Jl. Jend. Sudirman No.12,
Melayu, Kec. Tenggarong,
Kabupaten Kutai Kartanegara,
Kalimantan Timur 75512

KATA PENGANTAR

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 mengacu kepada Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang tahapan,tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud Undang- undang disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya yang di laksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 disusun untuk jangka waktu 1tahun. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026.

Lebih lanjut isi dari RENJA ini adalah gambaran perencanaan berbagai rencana pembangunan yang menjadi bagian dari tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai program dan kegiatan serta memperhatikan berbagai kondisi dan potensi lokal yang akan menjadi bagian dalam proses pembangunan di masa-masa yang akan datang dimana untuk program,kegiatan serta sub kegiatan telah dilakukan penyesuaian dengan PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kode fikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta KEPMENDAGRI Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Demikian RENJA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 disusun untuk dapat dipedomani bagi seluruh jajaran pejabat beserta staf di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mewujudkan pembangunan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Tenggarong, Oktober 2025

Kepala Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
Kabupaten Kutai Kartanegara

Daftar Isi

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA_PD	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja_PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra_PD	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	17
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	19
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	41
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional.	49
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	51
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Program dan Kegiatan	54
BAB VPENUTUP	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan dokumen perencanaan tahunan dengan kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara, RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara secara substansial menjabarkan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati dan program DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021-2026, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021- 2026.

RENJA DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan kinerja DPPKB untuk tahun kelima periode RENSTRA DPPKB 2021-2026 yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPPKB Tahun 2026 untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja RENSTRA dan RPJMD yang di selaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan nasional.

Penyusunan RENJA DPPKB Tahun 2026 mengacu ada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026. RENJA DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tahapan penyusunan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RENJA.
2. Penyusunan Rancangan Awal RENJA DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara berpedoman pada RENSTRA DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara, evaluasi hasil RENJA tahun lalu dan evaluasi hasil RENJA tahun berjalan.
3. Penyusunan Rancangan RENJA berdasarkan Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B - 1383 / 065.11 / BAPP / 2025 tentang TENTANG PEDOMAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN AWAL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 Pembahasan Rancangan RENJA DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Forum OPD DPPKB untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kutai Kartanegara tahun 2026 memperhatikan kepada peraturan Perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan RENJA dan arah garis kebijakan terkait yang dirumuskan antara lain:

- 1) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata CaraJangka Panjang Daerah dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 10) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi sertaTata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 12) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja PemerintahDaerah;
- 13) Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomen klatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 14) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15) Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari dibuatnya Rencana kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Kutai Kartanegara Periode 2021-2026. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu:

1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai wujud Pertanggung jawaban dalam mencapai visi misi Pemerintah Daerah.
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran Aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu terarah dan terukur.
3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 1 tahun.
4. Memberikan pedoman alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang**
- 1.2. Landasan Hukum**
- 1.3. Maksud dan Tujuan**
- 1.4. Sistematika Penulisan**

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA-PD Tahun lalu dan Capaian Renstra-PD**
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan**

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**
- 3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA-PD**

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Program dan Kegiatan**

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA-PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA-PD

Pencapaian keberhasilan kinerja program/kegiatan pada tahun **2024** secara keseluruhan capaian fisik rata-rata **96,6%** dan realisasi keuangan rata-rata **86,2%**.

Penjelasan Analisis Kinerja

Adapun analisis pencapaian kinerja output (fisik) sebagai berikut:

- 1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** Realisasi Anggaran Fisik sebesar **100 %**.
- 2. **Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)** Realisasi Anggaran Fisik sebesar **100 %**.
- 3. **Program Pengendalian Penduduk** Realisasi Anggaran Fisik sebesar **91,3 %**
- 4. **Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)** Realisasi Anggaran Fisik sebesar **94,0 %**.

Untuk rekapitulasi capaian sebagaimana dalam Tabel T-29.

Penjelasan Analisis Keuangan

Pencapaian keberhasilan kinerja keuangan program/kegiatan pada tahun **2024** secara keseluruhan target keuangan untuk Belanja Langsung yang **dikelola** sebesar **Rp.34.505.040.734,00** di **realisasikan** sebesar **Rp.29.745.372.305,00**

Adapun analisis pencapaian realisasi keuangan sebagai berikut:

- 1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** dengan target anggaran sebesar **Rp.12.586.475.734,00** terealisasi sebesar **Rp 10.490.836.057,00** atau tercapai sekitar **83,4 %**.
- 2. **Program Pengendalian Penduduk** dengan target **anggaran sebesar Rp. 4.273.6701.000,00** terealisasi **sebesar Rp. 3.672.498.148,00** atau sekitar **85,9%**.
- 3. **Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)** dengan target **anggaran sebesar Rp.10.473.414.000,00** terealisasi **sebesar Rp.8.880.592.960,00** atau sekitar **84,8%**.
- 4. **Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)** dengan target anggaran sebesar **Rp.7.171.450.000,00** terealisasi sebesar **Rp.6.701.445.140,00** atau sekitar **93,4 %**.

Tabel T-C.29													
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA DPPKB dan Pencapaian RENSTRA DPPKB s/d Tahun 2025													
Kabupaten Kutai Kartanegara													
Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2023)	
								Target Renja PD tahun (2023)	Realisasi Renja-PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
				Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,10	85,10	85,10	85,10	100,00	85,10	255,30	3,00
	1,1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen rencana anggaran dan evaluasi kinerja perangkat darah	885,00	177,00	177,00	177,00	100,00	177,00	531,00	0,60
	1.1.1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	5,00	15,00	3,00
	1.1.2			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	200,00	40,00	57,00	40,00	70,18	57,00	137,00	0,69
	1.1.3			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-P	100,00	20,00	20,00	20,00	100,00	20,00	60,00	0,60
	1.1.4			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	200,00	-	40	40	100,00	40	80,00	0,40
	1.1.5			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-P	100,00	20,00	20	20	100,00	20	60,00	0,60
	1.1.6			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	60,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	0,60
	1.1.7			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	200,00	40,00	57,00	40,00	70,18	40,00	120,00	0,60
												-	
	1,2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuanagan perangkat daerah yang akuntabel	60,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	0,60
	1.2.1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	70,00	14,00	14,00	14,00	100,00	14,00	42,00	0,60
	1.2.2			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP	Jumlah waktu penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	0,60
	1.2.3			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	0,60
	1.2.4			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	200,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	0,18
	1.2.5			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5,00	2,00	2,00	2,00	100,00	1,00	5,00	1,00

	1,3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah pada perangkat daerah	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	0,60
	1.3.1		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah LAporan Barang Milik Daerah yang di Rekonsiliasi	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	0,60
	1.3.2		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang di lakukan Penatausahaan	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	0,60
											-	
	1,4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN	340,00	68,00	68,00	68,00	100,00	1,00	137,00	0,40
	1.4.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4.2		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis	70,00	20,00	-	-	-	-	20,00	0,29
											-	
	1,5		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	100,00	100,00	42	100,00	238,10	42	242,00	2,42
	1.5.1		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan	150,00	30,00	30	30,00	100,00	30	90,00	0,60
	1.5.2		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Yang di sediakan	10,00	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00	6,00	0,60
											-	
	1.5.3		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggndaan	134.310,00	225,00	26.862	26.862,00	100,00	26.862	53.949,00	0,4017
											-	
	1.5.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bacaan Koran	2.200,00	960,00	960	440,00	45,83	960	2.360,00	1,07
	1.5.5		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	750,00	150,00	170	150,00	88,24	150	450,00	0,60
	1.5.6		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang ditata	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	0,60
											-	
	1,6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah	135,00	23,00	23,00	23,00	100,00	23,00	69,00	0,51
	1.6.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	59,00	7,00	7	7,00	100,00	7	21,00	0,36
	1.6.2		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Pagar Balai Penyuluhan KB	1,00	-	1,00	-	-	1,00	1,00	1,00
	1.6.3		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan sarana Prasarana gedung Kantor	75,00	30,00	30	30,00	100,00	30	90,00	1,20
											-	
	1,7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang di Sediakan	60,00	12,00	12	12,00	100,00	12	36,00	0,60
	1.7.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	60,00	12,00	12	12,00	100,00	12	36,00	0,60
	1.7.2		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60,00	12,00	12	12,00	100,00	12	36,00	0,60
	1.7.3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Tenga Pendukung Non PNS	60,00	12,00	12	12,00	100,00	12	36,00	0,60

[illegible]

	3,1		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya kegiatan advokasi dan KIE	25,00	5,00	5,00	5,00	100,00	5,00	15,00	0,60
	3.1.1		Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah pelaksanaan hari besar dan pameran	25,00	5,00	5,00	5,00	100,00	5,00	15,00	0,60
	3.1.2		Komunikasi,informasi dan edukasi (KIE)program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal	Jumlah sarana KIE	25,00	2,00	2,00	2,00	200,00	2,00	6,00	0,24
	3.1.3		Penyediaan dan distribusi sarana KIE program KKBPK	Jumlah sarana KIE	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	0,60
	3.1.4		Promosi dan KIE proram KKBPK melalui media masa cetak dan elektronik dan media luar ruang	Jumlah kegiatan Promosi	20,00							
	3.1.5		Penggunaan media masa cetak,elektronik,dan media lain nya sesuai keaifan budaya lokal dalam pencitraan program KKBPK	Jumlah Media	13,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	0,23
	3.1.6		Pelaksanaan Mekanisme oprasional Program KKBPK melalui rapat koordinas (Rakorcam) rapat koordinasi desa (Rakordes),dan minilokakarya	Jumlah Peserta	540,00	108,00	108,00	108,00	100,00	108,00	324,00	0,60
	3.1.7		Pengelolaan operasional dan sarana dibalai penyuluhan KKBPK	Jumlah kegiatan di balai penyuluhan KB	90,00	18,00	18,00	18,00	100,00	18,00	54,00	0,60
	3,2		Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB /Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terlaksana nya kegiatan oprasional KB dilapangan	1185		237	237	100,00	237	474,00	0,40
	3.2.1		Pembinaan IMP dan program KKBPK dilini lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah IMP yang di bina	1185	237	237	237	100,00	237	711,00	0,60
	3.2.2		Penyediaan sarana pendukung opeasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung	281	5	5	5	100,00	5	15,00	0,05
	3.2.3		Penguatan pelaksanaan penyuluhan,pergerakan,pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas keluarga beencana /prnyuluh lapangan keluarga berencana PKB/PLKB	Jumlah PKB/PLKB	345	69	69	69	100,00	69	207,00	0,60
	3.2.4		Penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	Jumlah PPKBD/Sub PPKBD	1185	237	237	237	100,00	237	711,00	0,60
	3,3		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya alat, obat dan kontasepsi pada Fasilitas Kesehatan	200,00	40,00	40,00	40,00	100,00	40,00	120,00	0,60
	3.3.1		Pengendalian Pendistribusian Alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah Faskes	200,00	40,00	40,00	40,00	100,00	40,00	120,00	0,60
	3.3.2		Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontarepsi jangka panjang (MKJP)	Jumlah Apseptor MKJP	3.500,00	700,00	700,00	700,00	100,00	700,00	2.100,00	0,60
	3.3.3		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana penunjang pelayanan KB	15,00	5,00	5	3,00	60,00	3,00	11,00	0,73
	3.3.4		Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Apseptor yang dilayani	1.920,00	1.600,00	1600	320,00	20,00	320,00	2.240,00	1,17
	3,4		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan ORMAS / POKJA yang terlibat dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	80,00	60,00	60,00	60,00	100,00	60,00	180,00	2,25
	3.4.1		Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Ormas dan Mitra Kerja	190,00	38,00	38	38,00	100,00	38,00	114,00	0,60
	3.4.2		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Persentase Kampung KB Bernilai Baik	100,00	20,00	20	20,00	100,00	20,00	60,00	0,60
	3.4.3		Pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB bernilai Baik	100,00	20,00	20	20,00	100,00	20,00	60,00	0,60
	4		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)									
				Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	7348	65,31	65,31	65,31	100,00	65,31	195,93	0,03

					Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	9197	72,97	72,97	72,97	100,00	72,97	218,91	0,02
					Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	64,63	57,32	57,32	57,32	100,00	57,32	171,96	2,66
					Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	9,00	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00	6,00	0,67
					Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	100,00	50,00	50,00	50,00	100,00	50,00	150,00	1,50
					Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	73,18	56,09	56,9	56,00	98,42	56,00	168,09	2,30
	4,1			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan pembinaan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga	40,15	30,72	30,72	30,72	100,00	30,72	92,16	2,30
	4.1.1			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah penyediaan sarana kelompok	164,00	54,00	54,00	54,00	100,00	54,00	162,00	0,99
	4.1.2			Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kader yang dilatih	695,00	215,00	215,00	75,00	34,88	75,00	365,00	0,53
	4.1.3			Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok	1.470,00	50,00	50,00	132,00	264,00	132,00	314,00	0,21
	4.1.4			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Peserta kegiatan promosi dan sosialisasi	750,00	150,00	150,00	150,00	100,00	150,00	450,00	0,60
	4.1.5			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah lomba-lomba	9,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	0,33
	4.1.6			Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Dokumen	3,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	1,00
	4,2			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan peran ORMAS dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	90,00	50,00	50,00	50,00	100,00	50,00	150,00	1,67
	4.2.1			Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kerjasama dengan mitra dan ormas	48,00	18,00	18,00	18,00	100,00	18,00	54,00	
	4.2.2			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah peserta	516,00	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	360,00	0,70
	4.2.3			Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah peserta	241,00	28,00	28,00	28,00	100,00	28,00	84,00	0,35

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Secara garis besar Pembangunan Kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting, yaitu: Pertama berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain: jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk. Kedua, berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan. Ketiga adalah mobilitas penduduk, seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar pulau maupun antara perkotaan dan perdesaan. Keempat adalah data dan informasi penduduk dan kelima adalah penyerasian kebijakan kependudukan. Pembangunan Kependudukan dan KB di Indonesia khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara harus benar - benar dapat memanfaatkan jendela peluang demografi untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa isu strategis terkait urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana baik secara regional dan nasional khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

- 1) Upaya dalam mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan sesuai dengan hak reproduksi.
- 2) Perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan di pengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
- 3) Upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Keluarga berkualitas menghasilkan keluarga yang berketahanan.

Beberapa Permasalahan yang di hadapi oleh DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya pencapaian tujuan “ mewujudkan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang tumbuh seimbang, berkualitas dan berdaya saing” yaitu:

- 1) Mempertahankan Angka Total Fertility Rate (TFR) sekitar 2,24 pada tahun 2024, dan ada beberapa faktor yang membuat TFR tinggi antara lain :
 - a. Akses pelayanan Keluarga Berencana yang terbatas.
 - b. Kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh KB dan petugas lapangan KB serta Kader KB yang belum maksimal.
 - c. Kurangnya sarana dan prasarana media KIE.
 - d. Kurangnya tenaga penyuluh PLKB dan PKB

- 2) Belum optimal nya Basis data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) antar stakeholder yang disebabkan oleh belum optimalnya pendataan serta koordinasi dan sinkronisasi antar stakeholder.
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan 8 (Delapan) fungsi keluarga yang disebabkan oleh belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan kelompok ketahanan keluarga

Untuk menanggulangi permasalahan dan isu-isu diatas maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menetapkan strategi dan kebijakan. Adapun strategi yang akan

dilakukan adalah:

- 1) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja DPPKB
- 2) Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi kebijakan antar stakeholder dalam program KKBPK
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga Berencana
- 4) Meningkatkan pembinaan kelompok ketahanan keluarga

Selanjut nya beberapa kebijakan yang akan dilaksanakan oleh DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah:

- 1) Peningkatan Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pada DPPKB
- 2) Peningkatan kualitas basis data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
- 3) Peningkatan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas.
- 4) Penguatan advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi KKBPK.
- 5) Peningkatan jumlah kelompok ketahanan keluarga (BKB,BKR,BKL,PIK-R,PPKS,UPPKS/UPPKA)
- 6) Pengembangan dan pemberdayaan kelompok ketahanan keluarga (BKB,BKR,BKL,PIK-R,PPKS,UPPKS/UPPKA).
- 7) Penyediaan sarana dan prasarana serta operasional kelompok ketahanan keluarga (BKB.BKR.BKL,PIK-,PPKS,UPPKS/UPPKA).
- 8) Peningkatan promosi dan sosialisasi program KKBPK.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2026 maka dapat dijelaskan bahwa RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Selanjutnya RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026.

Adapun dalam penyusunannya RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan yang terkait seperti RPJM Nasional, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RPJMD dan RKP Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD.

Tujuan Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah terciptanya sinkronisasi dan integrasi Program/Kegiatan Pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana menyebutkan bahwa program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang di rencanakan. Memperhatikan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara, Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi serta berdasarkan identifikasi permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara dan perkiraan kondisi tahun 2026 serta prospek tahun 2026 maka prioritas dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2026 di tetapkan sebagai berikut :

Sejalan dengan pokok-pokok kebijakan dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Program dan Kegiatan yang dimasukkan dalam rancangan awal RKPD merupakan program usulan hasil penyesuaian PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019 dan KEPMEN DAGRIIN Nomor 050-3708 Tahun 2020. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat di lihat pada table di berikut ini.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana <u>Kabupaten Kutai Kartanegara</u>												
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	Taging
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tenggarong	1). Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2). Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit BPK/Inspektorat 3). Persentase Ketepatan Input RUP pada Aplikasi SIRUP 4). Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKP per Tanggal 31 Maret 5). Tingkat Kepatuhan LHKASN per Tanggal 31 Maret 6). Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	1). 85.10 2). 100 3). 100 4). 100 5). 100 6). 65	12.473.954.484,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tenggarong	1). Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2). Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit BPK/Inspektorat 3). Persentase Ketepatan Input RUP pada Aplikasi SIRUP 4). Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKP per Tanggal 31 Maret 5). Tingkat Kepatuhan LHKASN per Tanggal 31 Maret 6). Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	1). 85.10 2). 100 3). 100 4). 100 5). 100 6). 65	12.473.954.484,00		
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	177,00	510.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	177,00	510.000.000,00		
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,00	200.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,00	200.000.000		
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	40,00	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	40,00	50.000.000		
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen RKA-P SKPD	20,00		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen RKA-P SKPD	20,00			
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokuman DPA-SKPD	40,00	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokuman DPA-SKPD	40,00	-		
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen DPA-P SKPD	20,00	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen DPA-P SKPD	20,00	20.000.000		

1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,00	40.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,00	40.000.000		
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40,00	200.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40,00	200.000.000		
1,2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel	12,00	8.507.390.798,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel	12,00	8.507.390.798,00		
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	14,00	8.217.390.798	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	14,00	8.217.390.798		
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP	Tenggarong	Jumlah waktu Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	15.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP	Tenggarong	Jumlah waktu Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	150,00	15.000.000		
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00	15.000.000		
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Bulnan/Triwulanan/Semesteran SKPD	40	250.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Bulnan/Triwulanan/Semes teran SKPD	60,00	250.000.000		
1.2.5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tenggarong	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	10.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tenggarong	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,00	10.000.000		
1,3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1,00	105.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1,00	105.000.000,00		

1.3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang direkonsiliasi	1,00	75.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang direkonsiliasi	1,00	75.000.000		
1.3.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang dilakukan penatausahaan	1,00	30.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang dilakukan penatausahaan	1,00	30.000.000		
1,4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1,00	410.048.000,00	Administrasi Kepegawaian P	Tenggarong	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1,00	410.048.000,00		
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tenggarong	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	160	360.048.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tenggarong	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	160,00	360.048.000		
1.4.2	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Tenggarong	Jumlah Peserta Bimtek Implementasi Perundang-Undangan	4	50.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	Jumlah Peserta Bimtek Implementasi Perundang-Undangan	-	50.000.000		
1.4.3						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tenggarong	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25,00			
1,5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Layanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	454.629.800,00	Administrasi Umum Perangk	Tenggarong	Jumlah Layanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	454.629.800,00		
1.5.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	30	75.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1,00	75.000.000		
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah Jenis Bahan Logistik yang disediakan	2	75.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4,00	75.000.000		
1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tenggarong	Jumlah Bahan Cetak dan Penggandaan yang disediakan	26.862	19.999.800	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tenggarong	Jumlah Bahan Cetak dan Penggandaan yang disediakan	225,00	19.999.800		

1.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tenggarong	Jumlah Bahan Bacaan	440	9.630.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tenggarong	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	960,00	9.630.000		
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarong	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	150	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150,00	200.000.000		
1.5.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	Arsip yang ditata	500	75.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1,00	75.000.000		
1.5.7						Penyediaan Bahan/Material	Tenggarong	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4			
1.5.8						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1,00			
1,6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tenggarong	Peralatan gedung kantor, kelengkapan gedung kantor dan bangunan pagar	23,00	175.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tenggarong	Peralatan gedung kantor, kelengkapan gedung kantor dan bangunan pagar	23,00	175.000.000,00		
1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong	Peralatan gedung kantor	15	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14,00	50.000.000		
1.6.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samboja	Jumlah Bangunan Pagar Balai Penyuluhan KB	15	75.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samboja	Jumlah Bangunan Pagar Balai Penyuluhan KB	1,00	75.000.000		
1.6.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Perlengkapan sarana prasarana gedung kantor	-	50.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15,00	50.000.000,00		

1,7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Tenggarong	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12,00	2.191.032.308,00	Penyediaan Jasa Penunjang U	Tenggarong	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12,00	2.191.032.308,00		
1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	12,00	200.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	12,00	200.000.000		
1.7.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah waktu penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12,00	200.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah waktu penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12,00	200.000.000		
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS	12,00	1.791.032.308	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS	12,00	1.791.032.308		
1,8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tenggarong	Jumlah Barang Milik Daerah	171,00	120.853.578,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tenggarong	Jumlah Barang Milik Daerah	171,00	120.853.578,00		
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan pemeliharaan dan pajak	11,00	70.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan pemeliharaan dan pajak	11,00	70.000.000		
1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan pemeliharaan dan pajak	160,00	853.578	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan pemeliharaan dan pajak	135,00	853.578		
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya uang dipelihara / direhabilitasi	1,00	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya uang dipelihara / direhabilitasi	1,00	50.000.000		

2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kutai Kartanegara	Cakupan stakeholder yang terlibat dalam program KKBPK	30,00	625.000.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kutai Kartanegara	Cakupan stakeholder yang terlibat dalam program KKBPK	30,00	625.000.000,00		
2,1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Tenggarong	Cakupan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah dalam pengendalian kuantitas penduduk	70,00	200.000.000,00	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Tenggarong	Cakupan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah dalam pengendalian kuantitas penduduk	70,00	200.000.000,00		
2.1.1	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap kependudukan ,keluarga berencana dan pembangunan keluarga program KKBPK	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1		Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1,00			
2.1.2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Tenggarong	Dokumen grand design	1		Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Tenggarong	Dokumen grand design	1,00			
2.1.3	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Tenggarong	Terbentuknya Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)	6	50.000.000	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Tenggarong, Loa Kulu Kota, Loa Janan, Sebulu, Tenggarong Seberang	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	6,00	50.000.000		
2.1.4	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Tenggarong	Tersedianya Materi Pendidikan dan Kependudukan	6	75.000.000	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Tenggarong	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	6,00	75.000.000		

2.1.5	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Tenggarong	Peserta Rapat	80	75.000.000	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	80,00	75.000.000		
2.1.6						Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Kutai Kartanegara	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	18			
2.1.7						Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Kutai Kartanegara	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	20			
2,2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Persentase pemetaan perkiraan pengendalian penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara	70,00	425.000.000,00	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Persentase pemetaan perkiraan pengendalian penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara	70,00	425.000.000,00		
2.2.1	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Kutai Kartanegara	Database	1	150.000.000	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1,00	150.000.000		
2.2.2	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kutai Kartanegara	Buku Profil	100	100.000.000	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1,00	100.000.000		
2.2.3	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Tenggarong	KK Yang Terdata	10.000	175.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Tenggarong	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	10.000	175.000.000		

2.2.4						Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	20,00			
2.2.5						Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	20,00			
3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kutai Kartanegara	Angka Total Fertility Rate (TFR)	2,20	1.057.000.000,00	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kutai Kartanegara	Angka Total Fertility Rate (TFR)	2,20	1.057.000.000,00		
			Angka Pemakaian CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun	77,15				Angka Pemakaian CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun	77,15			
			Angka peserta KB Baru	15,13				Angka peserta KB Baru	15,13			
			Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	12,00				Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	12,00			
			Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	16,05				Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	16,05			
			Persentase Angka Drop Out Akseptor	12,32				Persentase Angka Drop Out Akseptor	12,32			
3,1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kutai Kartanegara	Terlaksananya kegiatan advokasi dan KIE	5,00	485.000.000,00	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kutai Kartanegara	Jumlah kegiatan KIE		485.000.000,00		
3.1.1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakerholder dan Mitra Kerja	Kutai Kartanegara	Perayaan hari besar dan pameran	5	260.000.000	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kutai Kartanegara	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	18,00	260.000.000		

3.1.2	Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE) program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kutai Kartanegara	Jumlah Jenis Kegiatan KIE	2	75.000.000	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2,00	75.000.000		
3.1.3	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Masa Cetak dan Elektronik dan Media Luar Ruang	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	5	75.000.000	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana KIE yang didistribusikan	5,00	75.000.000		
3.1.4	Penggunaan Media Masa Cetak Elektronik dan Media Lain nya sesuai kearipan Budaya Lokal dalam pencitraan program KKBPK	Kutai Kartanegara	Jumlah Media Yang Digunakan	3	75.000.000	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Kutai Kartanegara	Jumlah Media Yang Digunakan	3,00	75.000.000		
3.1.5						Pengendalian Program KKBPK	Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	8			
3,2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB(PKB/PLKB)	Kutai Kartanegara	Jumlah PKB/PLKB	40,00	172.000.000,00	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB(PKB/PLKB)	Kutai Kartanegara	Jumlah PKB/PLKB	40,00	172.000.000,00		

3.2.1	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan Penggerakan Pelayanan dan pengembangan Program KKBPK untuk Petugas KB / Penyuluh Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kutai Kartanegara	Jumlah PKB/PLKB	-	100.000.000	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan Penggerakan Pelayanan dan pengembangan Program KKBPK untuk Petugas KB / Penyuluh Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	58	100.000.000		
3.2.2	Penyediaan sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana Pendukung PLKB/PKB	69		Penyediaan sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	58			
3.2.3	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kutai Kartanegara	Jumlah PKB/PLKB	69	72.000.000	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kutai Kartanegara	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	250	72.000.000		
3,3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Cakupan ORMAS / POKJA yang terlibat dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	60,00	225.000.000,00	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kutai Kartanegara	Cakupan ORMAS / POKJA yang terlibat dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	60,00	225.000.000,00		
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kutai Kartanegara	Jumlah Jenis Sarana Penunjang Pelayanan KB	3	75.000.000	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	10	75.000.000		
3.3.1	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kutai Kartanegara	Jumlah Apseptor Yang Dilayani	400	150.000.000	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	38,00	150.000.000		

3.3.2						Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kutai Kartanegara	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	45,00			
3.3.3						Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Desa/ Kelurahan	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	5,00			
3.4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kutai Kartanegara			175.000.000,00	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kutai Kartanegara			175.000.000,00		
3.4.1	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kutai Kartanegara	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	38	100.000.000	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kutai Kartanegara	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	38	100.000.000		
3.4.2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	40	75.000.000	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	38	75.000.000		
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kutai Kartanegara	Indek Pembangunan Keluarga	57,50	1.125.000.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kutai Kartanegara	Indek Pembangunan Keluarga	57,50	1.125.000.000,00		
			Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	65,31 72,97				Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	65,31 72,97			

			Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	57,32				Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	57,32			
			Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	2,00				Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	2,00			
			Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	50,00				Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	50,00			
			Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	56,09				Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	56,09			
4,1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kutai Kartanegara	Cakupan pembinaan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga	30,72	775.000.000,00	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kutai Kartanegara	Cakupan pembinaan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga	30,72	775.000.000,00		
4.1.1	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kutai Kartanegara	Jumlah penyediaan sarana kelompok	30	150.000.000	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	17,00	150.000.000		
			ATTG	-				Pemancar FM				
			BKB Kit Stunting	22								
			Kit Siap Nikah Anti Stunting	6								
			Pemancar FM	-					-			

4.1.2	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kutai Kartanegara	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	240	150.000.000	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kutai Kartanegara	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.796,00	150.000.000		
4.1.3	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kutai Kartanegara	Jumlah kelompok	394	300.000.000	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kutai Kartanegara	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	394,00	300.000.000		
4.1.4	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kutai Kartanegara	Peserta kegiatan promosi dan sosialisasi	150	50.000.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kutai Kartanegara	Peserta kegiatan promosi dan sosialisasi	150,00	50.000.000		
4.1.5	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kutai Kartanegara	Jumlah lomba-lomba	2	75.000.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat,	Kutai Kartanegara	Jumlah lomba-lomba	2,00	75.000.000		
4.1.6	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung tercapaian IPK	Kutai Kartanegara	Dokumen Kebijakan	5	50.000.000	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Kutai Kartanegara	Dokumen Kebijakan	20,00	50.000.000		

4.2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kutai Kartanegara	Cakupan peran ORMAS dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	50,00	350.000.000,00	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kutai Kartanegara	Cakupan peran ORMAS dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	50,00	350.000.000,00		
4.2.1	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kutai Kartanegara	Jumlah kerjasama dengan mitra dan ormas	4	100.000.000	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4,00	100.000.000		
4.2.2	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kutai Kartanegara	Jumlah peserta	68	150.000.000	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kutai Kartanegara	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	18,00	150.000.000		
4.2.3	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kutai Kartanegara	Jumlah peserta	50	100.000.000	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	18,00	100.000.000		
				TOTAL	15.280.954.484,00				TOTAL	15.280.954.484,00		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan RENJA 2026 ini ada usulan masyarakat khusus penentuan perumusan program dan kegiatan Kelompok Kerja berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, Musrenbang SKPD tingkat Provinsi dan Musrenbang kabupaten/kota serta mengakomodir usulan dari Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

Beberapa isu strategis peningkatan kesejahteraan keluarga sebagaimana yang tertuang dalam Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara Periode 2021-2026, yang harus mendapat perhatian khusus adalah Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera atau program KKBPK, maka di perlukan penguatan program dan kegiatan melalui penajaman pada tujuan dan sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang harus bermuara pada Isu Srategis Kutai Kartanegara yaitu Peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan bidang kesehatan dengan sasaran meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan hingga tingkat desa dan terciptanya budaya

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu di selenggarakan pembangunan yang berkelanjutan, terencana dan terarah. Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera merupakan bagian integral dan terpenting dalam pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakan nya Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan psesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.

Sebagai mana diketahui bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 68 tahun 2016 Tentang kedudukan Sususan Organisasi Fungsi serta Tata Kerja perangkat Daerah sebagai instansi yang diberi kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dituntut mempunyai Rencana Kerja (RENJA).

Rencana Kerja (RENJA di susun berdasarkan program yang terencana, terarah serta terukur yang di harapkan dapat memenuhi kehendak aspirasi serta partisipasi masyarakat sejalan
Dengan visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tahun 2026 merupakan tahun ke- 5 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2021 s/d 2026 disusun berdasarkan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Mengacu pada Permendagri Nomor 86 tahun 2017, maka ada rencana aksi untuk mereview Dokumen RENSTRA Dinas sehingga akan terjadi Perubahan terhadap indikator sasaran RENSTRA. Hal ini penting mengingat RENSTRA merupakan acuan implementatif bagi seluruh pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini memuat visi, misi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta perumusan strategi yang mencakup perumusan kebijaksanaan, program dan kegiatan RENSTRA SKPD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan program jangka menengah 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja SKPD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

3.2 .Tujuan dan Sasaran RENJA-PD

Maksud dari dibuatnya Rencana kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Kutai Kartanegara Periode 2021-2026. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026

Beberapa isu penting pembangunan terkait urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana baik ditingkat Nasional, Regional maupun ditingkat daerah di antaranya

Adalah sebagai berikut :

- 1) Upaya dalam mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur ke hamilan sesuai dengan hak reproduksi.
- 2) Perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan di pengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
- 3) Upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Keluarga berkualitas menghasilkan keluarga yang berketahanan.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menghadapi berbagai isu penting tersebut telah menyusun tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Visi: Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan			
Misi: Terbaik dalam Mewujudkan Pemenuhan dan Pemerataan Pelayanan Dasar, Pendidikan, dan Kesehatan Sosial			
Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Meningkatnya perencanaan kelahiran anak	Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kebijakan antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program kependudukan	Peningkatan Kualitas Basis Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (BANGGA KENCANA)
			Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan
		Meningkatkan Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga	Peningkatan Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, PPKS, UPPKA)
			Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, PPKS, UPPKA)
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana	Peningkatan Akses dan Pelayanan KB Yang Merata dan Berkualitas
			Penguatan Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi BANGGA KENCANA

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB dan Kader IMP (PPKBD, Sub PPKBD) dan Nakes

Adapun indikator tujuan dan sasaran yang akan dicapai yang mengacu pada target RENSTRA 2025-2029 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KE T
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Kualitas SDM yang berdaya saing dan berkarakter	Meningkatnya pembangunan keluarga yang berkualitas dan sejahtera		Indeks Pembangunan Keluarga	68,10	69,20	70,20	71,20	72,10	73,00	
		Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	78,50	82,70	85,40	87,10	88,20	88,80	

Selanjutnya program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

**Tabel. Rumusan Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai
Kartanegara**

NSPK DAN SASARA N YANG RELEV AN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera dan Pembinaan Keluarga Berencana	Meningkatk an pembangun an keluarga yang berkualitas dan sejahtera				Indeks Pembangunan Keluarga		
		Meningkatn ya kesejahtera an keluarga			Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)		
			Terkendalin ya pertambah an jumlah penduduk		1. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
					2. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		
				Terlaksananya pepaduan dan sinkronisasi program bangga kencana	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat dalam program bangga kencana	Pepaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
						Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
				Terlaksananya Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	
				Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang	

NSPK DAN SASARA N YANG RELEV AN	'TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
				SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	
				Terlaksananya Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	
				Terlaksananya Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	
				Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	
				Terlaksananya Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	
				Terlaksananya Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	

NSPK DAN SASARA N YANG RELEV AN	'TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
				Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	
				Terlaksananya Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	
				Terlaksananya Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	
				Terlaksananya Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	
				Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	
				Terlaksananya Pemetaan pengendalian penduduk	Persentasi Stekhokder yang menggunakan data keluarga dan kependudukan	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
				Terlaksananya Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	
				Terlaksananya Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	
				Terlaksananya Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	
				Terlaksananya Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	
				Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	
				Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	
				Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	
				Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	

NSPK DAN SASARA N YANG RELEV AN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
				Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk		
				Terlaksananya Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk	Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota	
				Terlaksananya Perumusan dan Evaluasi Parameter Pengendalian penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	
				Terlaksananya Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	
				Terlaksananya Penyusunan profil program Bangga Kencana tingkat Kabupaten/Kota provinsi (Termasuk diseminasi dan evaluasi hasil penyusunan profil Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serikat masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana		Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
					Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)		
					Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri		
						Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
				Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Pengendalian Program KKBPK	
				Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	
				Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai	

NSPK DAN SASARA N YANG RELEV AN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
				Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Penyuluhan Bangga Kencana	
				Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	
				Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	
				Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	
				Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi	Advokasi Program Bangga Kencana oleh	

NSPK DAN SASARA N YANG RELEV AN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
				(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	
						Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
				Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	
				Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
				Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	
				Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	

NSPK DAN SASARA N YANG RELEV AN	'TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
				Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		
						Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	
				Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
				Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	
				Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	

NSPK DAN SASARA N YANG RELEV AN	'TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
				Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	
				Terlaksananya Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	
				Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
				Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	
				Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	
				Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Peningkatan Kesertaan KB Pria	
				Terfasilitasinya Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	
				Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
				Sarana Penunjang Pelayanan KB	Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	
				Terlaksananya Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	
						Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
				Terlaksananya Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
				Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	
				Terlaksananya Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Pembinaan Terpadu Kampung KB	
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
				Kampung Keluarga Berkualitas		Kampung Keluarga Berkualitas	
				Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serikat masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera		Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
					Indeks Pengasuhan Remaja		
					Indeks Lansia Berdaya		
						Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
				Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana,	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana,	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
				Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	
				Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
				Terlaksananya aktifitas lansia sesuai tujuh dimensi lansia tangguh dalam mewujudkan lansia yang Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	
				Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	
				Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
				Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
				Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
				Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
				Terlaksananya Advokasi dan Promosi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	
				Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
				Terlaksananya Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	
				Terlaksananya Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
				Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Mendukung Tercapainya iBangga	
				Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
				Terlaksananya Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	
				Tersedianya biaya operasional bagi bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
				Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
				Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	
						Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
				Terlaksananya Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan	

NSPK DAN SASARA N YANG RELEV AN	'TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
				R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	
				Terlaksananya Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	
				Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	

NSPK DAN SASARA N YANG RELEV AN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
				Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
				Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
				Terlaksananya Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	
						Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)	
				Terlaksananya Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	Jumlah Kelompok Kegiatan Remaja yang Mendapatkan Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	

NSPK DAN SASARA N YANG RELEV AN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
				Tersedianya sarana edukasi PKBR dikelompok kegiatan	Jumlah unit sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan	Penyediaan Sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan	
				Terlaksananya orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya	Jumlah Kegiatan Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya yang terlaksana	Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya	
						Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)	
				Terlaksananya Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	Jumlah Kelompok Kegiatan Remaja yang Mendapatkan Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	
				Tersedianya sarana edukasi PKBR dikelompok kegiatan	Jumlah unit sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan	Penyediaan Sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan	
				Terlaksananya orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya	Jumlah Kegiatan Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya yang terlaksana	Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya	

NSPK DAN SASARA N YANG RELEV AN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
			Meningkatn ya akuntabilita s dan efektivitas kinerja instansi		Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semes teran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

NSPK DAN SASARA N YANG RELEV AN	'TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARA N YANG RELEV AN	'TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARA N YANG RELEV AN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

- a. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Pencapai Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kutai Kartanegara merupakan instansi teknis di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang di berikan kewenangan melaksanakan urusan wajib bukan pelayanan dasar, berusaha memberikan pelayanan dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan Visi,Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati. Dalam upaya pemberian layanan pada masyarakat masih terdapat permasalahan yang di sebabkan ada nya faktor penghambat.Namun demikian terdapat factor pendorong yang berkontribusi positif dalam perbaikan layanan. Permasalahan, faktor penghambat dan faktor pendorong dapat dilihat pada table berikut:

PERMASALAHANPOKOK (eselon II)	PERMASALAHAN (eselon III)	AKARMASALAH (eselon IV)
Rendahnya Indeks Pembangunan Keluarga di Kabupaten Kutai Kartanegara	Kurangnya peran stakeholder dalam Program KKBPK	Belum optimalnya basis Data Kependudukan, KeluargaBerencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) antar stakeholder
	Masih tingginya angkaTotal Fertility Rate (TFR) diKabupaten Kutai Kartanegara	Akses pelayanan yang kurang
		Kuantitas dan kualitas Tenaga penyuluh KB dan Petugas lapangan KB serta Kader KB yang belum maksimal
		Kurangnya Sarana Prasarana Media KIE
	Kurangnya pemberdayaan keluarga	Belum optimalnya Pembinaan dan Pemberdayaan kelompok Ketahanan keluarga
		Belum terpenuhinya sarana Dan prasarana serta Operasional kelompok Ketahanan keluarga

b. Uraian garis besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

1. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi terutama dengan adanya PERMENDAGRIN Nomor 90 Tahun 2019 dan KEPMENDAGRI Nomor 050-3708 Tahun 2020, maka Program pada Dinas PPKB Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2026 sebanyak **1 Program Generik dan 3 Program Teknis**. Dengan perincian dapat dilihat dari **Tabel** Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Berdasarkan Sumber Pendanaan tahun 2026.
2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyesuaikan jenis, target dan sasaran program maupun kegiatan, Lokasi kegiatan bisa bersifat menyeluruh di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Kegiatan yang bersifat pendampingan dan juga yang terfokus ke satu Kecamatan atau Desa jika jenis kegiatannya bersifat Pelatihan Ketrampilan.
3. Total kebutuhan dana/ pagu indikatif di tahun 2026 adalah sebesar Rp. 15.200.954.484, -

TC.33									
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026									
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA									
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Tatget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Tatget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1). Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2). Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit BPK/Inspektorat 3). Persentase Ketepatan Input RUP pada Aplikasi SIRUP 4). Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN per Tanggal 31 Maret 5). Tingkat Kepatuhan LHKASN per Tanggal 31 Maret 6). Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah		1). 85.40 2). 100 3). 100 4). 100 5). 100 6). 75	12.468.954.484,00			1). 85.40 2). 100 3). 100 4). 100 5). 100 6). 75	12.468.954.484,00
1,1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	177,00	510.000.000,00	APBD		177,00	510.000.000,00
	Penyelenggaraan Walidata Mendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	1,00					
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Darah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	1,00					
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	1,00					
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	5,00	200.000.000,00	APBD		6,00	200.000.000,00

1.1.2			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	40,00	50.000.000,00	APBD		40,00	50.000.000,00
1.1.3			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-P SKPD	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	20,00	20.000.000,00	APBD		20,00	20.000.000,00
1.1.4			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokuman DPA-SKPD	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	40,00		APBD		40,00	
1.1.5			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-P SKPD	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	20,00		APBD		20,00	
1.1.6			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	12,00	40.000.000,00	APBD		12,00	40.000.000,00
1.1.7			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	40,00	200.000.000,00	APBD		40,00	200.000.000,00
1,2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	14,00	8.507.390.798,00	APBD		14,00	8.507.390.798,00
1.2.1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	12,00	8.217.390.798,00	APBD		12,00	8.217.390.798,00
1.2.2			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah waktu Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	1,00	15.000.000,00	APBD		1,00	15.000.000,00
1.2.3			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	40,00	15.000.000,00	APBD		40,00	15.000.000,00
1.2.4			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulnan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	1,00	250.000.000,00	APBD		1,00	250.000.000,00
1.2.5			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	1,00	10.000.000,00	APBD		1,00	10.000.000,00
					Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong						
1,3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	1,00	105.000.000,00	APBD		1,00	105.000.000,00

		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1	75.000.000				75.000.000
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2	30.000.000				30.000.000
1.3.1		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang direkonsiliasi	Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong	68,00		APBD			
1.3.2		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang dilakukan penatausahaan	Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong	-		APBD			
				Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong						
1.4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong	42,00	410.048.000,00	APBD		42,00	410.048.000,00
1.4.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut	Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong	30,00	360.048.000,00	APBD		30,00	360.048.000,00
1.4.2		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut	Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong	2,00		APBD		2,00	
1.4.2		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong		50.000.000,00	APBD			50.000.000,00
1.5		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong	26.962,00	449.629.800,00	APBD		26.962,00	449.629.800,00
1.5.1		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong	440,00	75.000.000,00	APBD		440,00	75.000.000,00
1.5.2		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik yang disediakan	Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong	150,00	70.000.000,00	APBD		150,00	70.000.000,00
1.5.3		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bahan Cetak dan Penggandaan yang	Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong	1,00	19.999.800,00	APBD		1,00	19.999.800,00
1.5.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan	Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong	30,00	9.630.000,00	APBD		30,00	9.630.000,00
1.5.5		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong	15,00	200.000.000,00	APBD		15,00	200.000.000,00
1.5.6		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip	Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong	-	75.000.000,00	APBD		-	75.000.000,00
1.6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong	12,00	100.000.000,00	APBD		12,00	100.000.000,00
1.6.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan gedung kantor	Kab. Kutai	12,00	50.000.000,00	APBD		12,00	50.000.000,00

1.6.2		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Pagar Balai Penyuluhan KB	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	12,00		APBD		12,00	
1.6.3		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perlengkapan sarana prasarana gedung kantor	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	12,00	50.000.000,00	APBD		12,00	50.000.000,00
1.7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	11,00	2.191.032.308,00	APBD		11,00	#####
1.7.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	160,00	200.000.000,00	APBD		160,00	200.000.000,00
1.7.2		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	1,00	200.000.000,00	APBD		1,00	200.000.000,00
1.7.3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong		1.791.032.308,00	APBD			#####
1.8		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	1,00	195.853.578,00	APBD		1,00	195.853.578,00
1.8.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan pemeliharaan dan pajak	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	1,00	70.000.000,00	APBD		1,00	70.000.000,00
1.8.2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan pemeliharaan dan pajak	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	1,00	75.853.578,00	APBD		1,00	75.853.578,00

1.8.3			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya uang dipelihara / direhabilitasi	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	6,00	50.000.000,00	APBD		6,00	50.000.000,00
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			Cakupan stakeholder yang terlibat dalam program KKBPK		80,00	550.000.000,00			80,00	550.000.000,00
				Tersedianya dokumen grand design kependudukan							
2.1		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Cakupan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah dalam pengendalian kuantitas penduduk	Kutai Kartanegara	1,00	125.000.000,00	APBD		1,00	125.000.000,00
2.1.1			Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen grand design	Kutai Kartanegara	100,00		APBD		100,00	
2.1.2			Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	Kutai Kartanegara	10.000,00	50.000.000,00	APBD		10.000,00	50.000.000,00
2.1.3			Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Tersedianya Materi Pendidikan dan Kependudukan	Kutai Kartanegara	43,00		APBD		43,00	
2.1.4			Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	Kutai Kartanegara		75.000.000,00	APBD			75.000.000,00

		Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kutai Kartanegara	1,00		APBD		1,00	
2,2		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemetaan perkiraan pengendalian penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara	Kutai Kartanegara	5,00	425.000.000,00	APBD		5,00	425.000.000,00
2.2.1		Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Kutai Kartanegara	5,00	150.000.000,00	APBD		5,00	150.000.000,00
2.2.2		Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kutai Kartanegara	2,00	100.000.000,00	APBD		2,00	100.000.000,00
2.2.3		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Kutai Kartanegara	1,00	175.000.000,00	APBD		1,00	175.000.000,00
		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kutai Kartanegara	106.428					
3		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Pemakaian CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun		3,00	1.057.000.000,00			3,00	#####
			Angka peserta KB Baru		108,00				108,00	
			Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)		18,00				18,00	
			Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		237,00				237,00	
			Persentase Angka Drop Out Akseptor		237,00				237,00	
3,1		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan	Terlaksananya kegiatan advokasi dan KIE	Kutai Kartanegara	69,00	485.000.000,00	APBD		69,00	485.000.000,00
3.1.1				Kutai	237,00	260.000.000,00	APBD		237,00	260.000.000,00

3.1.1		Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kutai Kartanegara	237,00	260.000.000,00	APBD		237,00	260.000.000,00
3.1.2		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		75.000.000,00	APBD		40,00	75.000.000,00
3.1.3		Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Masa Cetak dan Elektronik serta media luar ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kutai Kartanegara		75.000.000,00	APBD			75.000.000,00
3.1.4		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya LokalPromosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Komunikasi, Informasi dan	Kutai Kartanegara	40,00	75.000.000,00	APBD		40,00	75.000.000,00

			Budaya LokalPromosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan							
85	3.1.5		Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah Media Yang Digunakan	Kutai Kartanegara	700,00		APBD		700,00	
86											
87											
88	3,2		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terlaksananya kegiatan operasional KB di Lapangan	Kutai Kartanegara	400,00	172.000.000,00	APBD		400,00	172.000.000,00
			Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah IMP yang dibina	Kutai Kartanegara	237,00	72.000.000,00	APBD		237,00	72.000.000,00
89			Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana oleh Petugas Lapangan KB dan Petugas Lapangan BKKBN	Jumlah Laporan Hasil Penggerakan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana	Kab. Kutai Kartanegara, Samarinda	1,00					
90	3,3		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya alat, obat dan kontasepsi pada Fasilitas Kesehatan	Kutai Kartanegara	38,00	225.000.000,00	APBD		38,00	225.000.000,00
95			Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Kutai Kartanegara	12,00					
96	3.3.1		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan	Alat dan obat kontrasepsi	Kutai Kartanegara	60,00	75.000.000,00	APBD		60,00	75.000.000,00
97	3.3.2		Dukungan Operasional Pelayanan KB Berbasis Komunitas	Akseptor (unmet need) yang terlayani	Kutai Kartanegara	60,00	150.000.000,00	APBD		60,00	150.000.000,00
98											

9			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,00		APBD			
00	3,4		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan ORMAS / POKJA yang terlibat dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Kutai Kartanegara	69.78 80.93 59.36 5,00 77.78 64.65	175.000.000,00	APBD		69.78 80.93 59.36 5,00 77.78 64.65	175.000.000,00
01	3.4.1		Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kegiatan sosialisasi	Kutai Kartanegara	35,75	100.000.000,00	APBD		35,75	100.000.000,00
02	3.4.2		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Persentase Kampung KB Bernilai Baik	Kutai Kartanegara	30,00	75.000.000,00	APBD		30,00	75.000.000,00
03			Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) dikampung berkualitas	Jumlah DASHAT Dikampung KB	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20,00					
04			Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kutai Kartanegara	2,00					
05	4		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB		150,00	1.125.000.000,00			150,00	#####
06				Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB		2,00				2,00	
07				Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB		1,00				1,00	
08				Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera		70,00				70,00	

			Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri		42,00				42,00	
4,1		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan pembinaan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kutai Kartanegara		775.000.000,00	APBD			775.000.000,00
4.1.1		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Apseptor (UPPKA)	Jumlah penyediaan sarana kelompok	Kutai Kartanegara	55,00	150.000.000,00	APBD			150.000.000,00
4.1.2		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Apseptor (UPPKA)	Orang dalam kelompok	Kutai Kartanegara	930,00	150.000.000,00	APBD			150.000.000,00
4.1.3		Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Apseptor (UPPKA)	Jumlah kelompok	Kutai Kartanegara	394,00	300.000.000,00	APBD			300.000.000,00
4.1.4		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan	Kutai Kartanegara	10,00	50.000.000,00	APBD			50.000.000,00

4.1.5		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga Apseptor UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Menjadi Orang Tua hebat Generasi Berencana	Kutai Kartanegara	60,00	75.000.000,00	APBD			75.000.000,00
4.1.6		Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Dokumen Kebijakan	Kutai Kartanegara		50.000.000,00	APBD			50.000.000,00
		Pembentukan Kelompok dan Kesejahteraan BKB,BKR Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Kutai Kartanegara	50,00				50,00	
4.2		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kutai Kartanegara		350.000.000,00	APBD			350.000.000,00
4.2.1		Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra	Kutai Kartanegara	4,00	100.000.000,00	APBD			100.000.000,00

4.2.1		Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kutai Kartanegara	4,00	100.000.000,00	APBD			100.000.000,00
4.2.2		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kutai Kartanegara	68,00	150.000.000,00	APBD			150.000.000,00
						15.200.954.484,00				15.200.954.484,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 merupakan salah satu rencana pencapaian kinerja tahun Ke-5 (Lima) urusan wajib bukan pelayanan dasar dengan Indikator Kinerja Utama adalah:

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	68,10	69,20	70,20	71,20	72,10	73,00
2	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Indeks	78,50	82,70	85,40	87,10	88,20	88,80

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah(RKPD) Tahun 2026. Proses penyusunan RKPD Tahun 2026 mengacu pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah.

A. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian:

- 1) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlu melakukan perhitungan Indeks Pembangunan Keluarga.
- 2) Angka Total Fertility Rate (TFR) dipengaruhi oleh beberapa indikator yaitu:
 - a. Angka Pemakaian CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun.
 - b. Angka peserta KB Baru.

- c. Angka unmetneed
 - d. Penggunaan MKJP
 - e. Persentase angka drop-out akseptor
- 3) Kurang nya sarana dan prasarana pelayanan dalam menunjang kegiatan baik untuk pelayanan internal maupun pelayanan eksternal terkait dengan tugas dan fungsi OPD serta sarana prasarana kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
 - 4) Jumlah tenaga PKB/PLKB yang jauh dari ideal, sekitar 5 Desa dibina oleh satu orang PKB/PLKB sedangkan yang idealnya 1 atau 2 Desa di bina oleh 1 orang PKB/PLKB.
 - 5) Percepatan Penurunan STUNTING di wilayah LOKUS STUNTING masih tinggi.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi RENJA merupakan hal penting yang perlu di upayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistic yang di emban oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai salah satu SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan isi RENJA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

C. Rencana tindak lanjut

Sasaran yang ingin di capai dalam kurun waktu satu tahun kedepan merupakan penjabaran dari prioritas tujuan. Dalam upaya mencapai tujuan unit kerja perlu di tetapkan program tahunan, yaitu sebagaimana tersebut yang di tuangkan dalam Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026.

Untuk mewujudkan tujuan pencapaian tingkat kinerja di atas tidak dapat di laksanakan melalui suatu kegiatan yang bersamaan, tetapi harus melalui tahapan yang berkesinambungan. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut yang menjadi sarana prioritas adalah memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Rencana Kerja (RENJA) OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kabupaten Kutai Kartanegara, disusun berdasarkan program dan kegiatan pada bidang-bidang teknis dan usulan dari hasil musrenbang kabupaten. Penyempurnaan metrik RENJA OPD bertujuan untuk mewujudkan alat ukur efektivitas pencapaian sasaran pembangunan. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target- target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indicator kinerjanya. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan rencana kerja tahunan adalah target dan pencapaian indicator kinerja.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 disampaikan, sebagai acuan dan di jadikan sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan serta sebagai alat ukur efektivitas pencapaian sasaran pembangunan, efesiensi belanja dan akuntabilitas kinerja Pemerintah.